



Implementasi Sistem Monitoring Pembangunan Berbasis Kolaborasi untuk Optimalisasi Tata Kelola Pemerintah Kota Parepare

Eka Qadri Nuranti¹, Naili Suri Intizhami^{2*}, Khaera Tunnisa³, Mar'atuttahirah⁴,
Muhammad Rivaldi Jefri⁵, Muhammad Anugrah⁶, Muhammad Alfian⁷,
Lukman Hakim⁸, Muhammad Aldi Alfatih⁹, Rahmat Eka Putra R Palaloi¹⁰

^{1,2*,5,6,9}Ilmu Komputer, ^{3,4,7,8,10}Sistem Informasi,

Institut Teknologi Bacahrudin Jusuf Habibie, Indonesia.

*Corresponding Author. Email: naili.suri@ith.ac.id

Abstract: This community service program aims to implement a Development Monitoring System based on collaboration between academics and the local government in order to improve reporting efficiency, data consistency, and information validity, while strengthening the capacity of government officials to support transparent and accountable governance. The program involved 14 officials from the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Parepare City. The implementation methods included needs analysis, system design, implementation, as well as training and technical assistance. Evaluation was conducted through pre-test and post-test assessments using the Quizizz application and user satisfaction questionnaires. The results showed an improvement in participants' understanding, particularly in technical aspects, with an accuracy increase of 25% (from 64% to 89%). In addition, the level of user satisfaction was high, with the ease-of-use score reaching 4.50 out of 5, indicating that the system was easy to operate and well accepted by users. This program highlights the importance of collaboration between academics and local government in realizing data-driven development governance and has the potential to be further developed through integration with other systems, such as the Regional Innovation System and the Performance Indicator System.

Abstrak: Tujuan program pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mengimplementasikan Sistem Monitoring Pembangunan berbasis kolaborasi antara akademisi dan pemerintah daerah guna meningkatkan efisiensi pelaporan, konsistensi data, serta validitas informasi, sekaligus memperkuat kapasitas aparatur dalam mendukung tata kelola yang transparan dan akuntabel. Kegiatan pengabdian ini melibatkan 14 aparatur Bappeda Kota Parepare. Metode pelaksanaan meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, serta pelatihan dan pendampingan teknis. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test berbasis aplikasi Quizizz serta kuesioner kepuasan pengguna. Hasil menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta, khususnya pada aspek teknis dengan peningkatan akurasi sebesar 25% (dari 64% menjadi 89%). Selain itu, tingkat kepuasan pengguna tergolong tinggi dengan skor kemudahan penggunaan mencapai 4,50 dari skala 5, yang menunjukkan bahwa sistem mudah dioperasikan dan diterima dengan baik. Program ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara akademisi dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pembangunan berbasis data, serta memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut melalui integrasi dengan sistem lain seperti Sistem Inovasi Daerah dan Sistem Indikator Kinerja.

Article History:

Received: 11-02-2026
Reviewed: 24-03-2026
Accepted: 18-04-2026
Published: 20-05-2026

Key Words:

Digital Transformation;
Development Monitoring;
e-Monev; Data
Governance.

Sejarah Artikel:

Diterima: 11-02-2026
Direview: 24-03-2026
Disetujui: 18-04-2026
Diterbitkan: 20-05-2026

Kata Kunci:

Transformasi Digital;
Monitoring Pembangunan;
e-Monev; Tata Kelola
Data.

How to Cite: Nuranti, E. Q., Intizhami, N. S., Tunnisa, K., Mar'atuttahirah, Jefri, M. R., Anugrah, M., ... Palaloi, R. E. P. R. (2026). Implementasi Sistem Monitoring Pembangunan Berbasis Kolaborasi untuk Optimalisasi Tata Kelola Pemerintah Kota Parepare. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 7(2), 587-595. <https://doi.org/10.33394/jpu.v7i2.19958>



<https://doi.org/10.33394/jpu.v7i2.19958>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Pendahuluan

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan menjadi kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik (Mozin et al., 2025; Seyselis & Pradana, 2021; Yuli Santri Isma et al., 2025). Pemerintah dituntut untuk menghadirkan sistem yang mampu menyajikan data pembangunan secara real-time, terstruktur, dan dapat diakses lintas sektor guna mendukung perencanaan serta pengambilan kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*) (Judijanto, 2025; Katharina & Savira, 2022; Tri Utami, 2025).

Peran strategis dalam proses perencanaan pembangunan dan monitoring untuk setiap daerah berada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) (Nasir, 2023). Peran tersebut juga berlaku untuk Kota Parepare. Lembaga ini bertanggung jawab terhadap konsolidasi data pembangunan, pengukuran capaian kinerja, serta identifikasi kendala yang dihadapi oleh perangkat daerah (PD) dalam pelaksanaan program pembangunan. Dalam konteks Kota Parepare, Bappeda harus mengoordinasikan data dari 34 perangkat daerah yang secara rutin melaporkan capaian kinerja pembangunan setiap periode triwulan. Namun, hingga tahun 2025, proses monitoring masih dilakukan secara manual menggunakan dokumen fisik dan aplikasi Excel. Mekanisme ini menghadirkan berbagai permasalahan, antara lain: sulitnya konsolidasi data lintas perangkat daerah, tingginya risiko kesalahan input dan inkonsistensi data, lambatnya pembaruan informasi (El Falah et al., 2025; Salam et al., 2024).

Proses konsolidasi manual yang dilakukan setiap triwulan umumnya memerlukan waktu beberapa hari hingga lebih dari satu minggu, terutama pada tahap pengumpulan, verifikasi, dan rekapitulasi data dari seluruh perangkat daerah. Permasalahan semakin kompleks pada tahap rekapitulasi, di mana tidak jarang perangkat daerah masih melakukan revisi atau perubahan data setelah proses pengumpulan dilakukan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan data serta memperlambat proses finalisasi laporan, karena tim pelaporan harus melakukan penyesuaian berulang. Kelemahan yang paling mencolok dalam sistem yang berjalan adalah ketiadaan mekanisme penguncian data triwulan, yang memungkinkan terjadinya perubahan data setelah periode pelaporan ditutup, sehingga dapat memengaruhi validitas dan reliabilitas laporan kinerja pembangunan. Keterbatasan sistem manual tersebut berdampak langsung terhadap kualitas pengambilan keputusan oleh pemangku kebijakan. Keputusan yang seharusnya berbasis data menjadi tertunda atau kurang akurat akibat keterlambatan dan inkonsistensi laporan antar perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan solusi berbasis teknologi yang mampu menggantikan sistem manual dengan sistem digital yang terintegrasi, akurat, dan transparan (El Falah et al., 2025; Mozin et al., 2025; Seyselis & Pradana, 2021).

Sebagai bentuk kontribusi akademisi dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis digital dan *data driven*, Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie (ITH) melalui berinisiatif melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melalui pengembangan Sistem Monitoring Pembangunan. Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam menerapkan hasil riset untuk menjawab kebutuhan riil, khususnya dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan data pembangunan daerah. Meskipun sebagian besar aparatur telah terbiasa menggunakan berbagai sistem pelaporan berbasis web, terutama yang terintegrasi dengan pemerintah pusat, masih terdapat kebutuhan akan sistem monitoring yang lebih sesuai dengan konteks dan



kebutuhan daerah. Sistem yang tersedia sebelumnya belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik, seperti validasi data secara otomatis, mekanisme penguncian data triwulan, serta integrasi data lintas perangkat daerah secara efektif. Hal ini mendorong perlunya pengembangan sistem yang tidak hanya bersifat digital, tetapi juga adaptif terhadap alur kerja dan kebutuhan pengguna di tingkat daerah.

Oleh karena itu, tujuan program pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mengimplementasikan Sistem Monitoring Pembangunan berbasis kolaborasi antara akademisi dan pemerintah daerah di Kota Parepare guna meningkatkan efisiensi pelaporan, konsistensi data, serta validitas informasi, sekaligus memperkuat kapasitas aparatur dalam mendukung tata kelola yang transparan dan akuntabel. Melalui program ini, pengembangan sistem monitoring tidak hanya difokuskan pada penyediaan teknologi, tetapi juga pada optimalisasi pemanfaatan sistem oleh pengguna. Rangkaian kegiatan berupa sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan teknis dirancang untuk memastikan bahwa aparatur mampu mengoperasikan sistem secara efektif dan berkelanjutan. Dengan dukungan fitur seperti validasi otomatis, penguncian data triwulan, serta visualisasi data interaktif yang mudah dipahami, sistem ini diharapkan mampu memperkuat budaya kerja yang transparan, akuntabel, serta mendukung pengambilan keputusan pembangunan yang berbasis data aktual.

Metode Pengabdian

Kegiatan PkM ini dilaksanakan di Bappeda Kota Parepare sebagai mitra utama dalam rentang waktu Juni hingga September 2025. Puncak kegiatan berupa sosialisasi dan pelatihan teknis Sistem Monitoring Pembangunan dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2025. Peserta kegiatan merupakan pegawai Bappeda yang terdiri atas tiga peran utama, yaitu admin, operator, dan perwakilan perangkat daerah (SKPD). Seluruh peserta merupakan aparatur yang terlibat langsung dalam proses monitoring pembangunan, sehingga menjadi sasaran utama dalam peningkatan kapasitas penggunaan sistem digital.

Metode kegiatan yang digunakan merupakan kombinasi dari pelatihan (training), simulasi ipteks, dan pendampingan teknis. Pada tahap awal, dilakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman mengenai urgensi transformasi digital dalam monitoring pembangunan. Selanjutnya, dilaksanakan pelatihan teknis dengan materi meliputi:

- 1) Pengenalan konsep monitoring dan alur kerja sistem
- 2) Simulasi input data triwulanan pada aplikasi
- 3) Pembacaan laporan dashboard dan mekanisme validasi
- 4) Implementasi fitur penguncian data sebagai upaya menjaga konsistensi dan akuntabilitas laporan

Pendekatan pendampingan dilakukan secara langsung oleh tim dosen dan mahasiswa ITH selama proses simulasi dan uji coba sistem di lingkungan kerja. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan peserta mampu mengoperasikan sistem secara bertahap dan mandiri. Pendekatan ini dipilih untuk mengintegrasikan pemahaman konseptual dengan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam aktivitas monitoring pembangunan.

Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan dua instrumen, yaitu: (1) pre-test dan post-test berbasis aplikasi Quizizz yang terdiri dari 14 butir pertanyaan (7 pertanyaan umum dan 7 pertanyaan teknis), serta (2) kuesioner kepuasan pengguna menggunakan skala Likert (1–5). Data hasil *pre-test* dan *post-test* dianalisis dengan membandingkan rata-rata tingkat akurasi jawaban peserta sebelum dan sesudah pelatihan untuk mengukur peningkatan pemahaman. Sementara itu, data kuesioner dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif



dengan menghitung nilai rata-rata pada setiap indikator untuk menilai tingkat kepuasan dan penerimaan pengguna terhadap sistem yang dikembangkan.

Hasil Pengabdian dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan PkM berlangsung melalui serangkaian tahapan yang terstruktur sejak awal hingga selesai. Proses dimulai dengan analisis kebutuhan bersama Bappeda Kota Parepare untuk mengidentifikasi permasalahan utama dalam proses monitoring pembangunan yang masih dilakukan secara manual. Diskusi awal menghasilkan kesepakatan bahwa sistem baru perlu menyediakan fitur validasi otomatis, mekanisme penguncian data triwulan, serta dashboard visual yang interaktif. Tahapan ini dilakukan melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) antara tim pengabdian dan pihak Bappeda, yang bertujuan untuk menggali kebutuhan pengguna secara langsung. Dokumentasi kegiatan FGD awal serta penyampaian progres pengembangan sistem ditunjukkan pada

Gambar 1. Tahap berikutnya adalah perancangan dan persiapan teknis, di mana tim dosen dan mahasiswa ITH menyusun alur sistem, kebutuhan server, serta rancangan modul pelatihan bagi pengguna. Selanjutnya, dilakukan pengujian awal melalui *deployment* sistem di server ITH untuk memastikan fungsionalitas dasar berjalan sesuai kebutuhan mitra.



Gambar 1. (Kiri) FGD awal untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem di Bappeda Kota Parepare; (Kanan) penyampaian progres pengembangan Sistem Monitoring Pembangunan

Puncak kegiatan adalah sosialisasi dan pelatihan teknis yang dilaksanakan pada 1 Agustus 2025 di kantor Bappeda Kota Parepare. Pelatihan ini diikuti oleh pegawai dengan berbagai peran, seperti admin, operator, dan perwakilan SKPD. Dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada Gambar 2. Peserta diberikan materi mengenai transformasi digital, simulasi input data, cara membaca laporan dashboard, serta mekanisme penguncian data triwulanan. Setelah pelatihan, tim PkM juga melaksanakan pendampingan lanjutan untuk memastikan sistem dapat dioperasikan secara mandiri oleh Bappeda. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan sebuah sistem digital, tetapi juga membekali SDM pemerintah daerah dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengoptimalkan tata kelola pembangunan berbasis data.

Sistem Monitoring Pembangunan terbukti memberikan kontribusi nyata Pengembangan terhadap peningkatan efektivitas tata kelola di lingkungan Bappeda Kota Parepare. Keberhasilan ini terlihat jelas melalui kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Teknis Sistem Monitoring Pembangunan yang dilaksanakan pada 1 Agustus 2025, diikuti oleh 14 peserta yang terdiri dari tiga peran strategis, yakni admin, operator Bappeda, dan perwakilan SKPD. Efektivitas pelatihan diukur dengan metode pre-test dan post-test berbasis aplikasi Quizizz yang berisi 14 soal, terdiri atas 7 pertanyaan umum mengenai transformasi digital dan proses monitoring manual, serta 7 pertanyaan teknis terkait penggunaan sistem monitoring.



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Teknis Sistem Monitoring Pembangunan

Quizizz dipilih karena mampu menilai tidak hanya ketepatan jawaban, tetapi juga kecepatan dalam menyelesaikan soal, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap tingkat pemahaman peserta. Hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 3 yang menunjukkan bahwa pada aspek pengetahuan umum, rata-rata akurasi peserta meningkat dari 80% pada pre-test menjadi 93% pada post-test. Peningkatan ini tidak terlalu tinggi karena pegawai Bappeda sudah cukup familiar dengan konsep digitalisasi dan sistem administrasi berbasis teknologi yang sebelumnya digunakan.



Gambar 3. Hasil Perbandingan Pre-Test dan Post-Test

Sebaliknya, pada aspek pertanyaan teknis, hasilnya menunjukkan peningkatan yang jauh lebih signifikan. Akurasi jawaban meningkat dari 64% pada pre-test menjadi 89% pada post-test. Peningkatan paling menonjol terdapat pada pemahaman mengenai mekanisme penguncian data triwulan, keuntungan penggunaan sistem daring, serta prosedur input dan validasi data oleh SKPD. Hasil ini menegaskan bahwa pelatihan tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga memperkuat keterampilan praktis pegawai dalam mengoperasikan sistem baru secara mandiri. Peningkatan yang lebih tinggi pada aspek teknis dibandingkan aspek umum mengindikasikan bahwa metode pelatihan yang digunakan, khususnya pendekatan *hands-on experience*, lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan operasional dibandingkan pemahaman konseptual (Ulhaq & Winarti, 2026). Hal ini sejalan dengan teori pembelajaran orang dewasa (*andragogy*) yang menyatakan bahwa individu dewasa cenderung lebih mudah memahami materi yang bersifat aplikatif dan langsung relevan dengan tugas pekerjaan mereka (Knowles et al., 2015; Mustacisa-Lacaba, 2026). Selain itu, beberapa materi teknis seperti mekanisme penguncian data triwulan merupakan konsep baru



bagi peserta, sehingga memberikan dampak peningkatan yang lebih signifikan setelah pelatihan.

Selain melalui pre-test dan post-test, efektivitas program juga diperkuat dengan hasil evaluasi yang diisi oleh peserta setelah kegiatan pelatihan. Gambar 4 memperlihatkan bahwa sistem monitoring bahwa mayoritas aspek yang diukur memperoleh skor rata-rata di atas 4 dari skala 5. Aspek kemudahan penggunaan menempati skor tertinggi (4,50), yang menandakan bahwa sistem e-Monev dianggap ramah pengguna dan mudah dioperasikan. Dukungan teknis juga mendapatkan skor tinggi (4,43), merefleksikan peran penting pendampingan dalam memfasilitasi proses adaptasi teknologi di lingkungan kerja. Tingginya skor pada aspek kemudahan penggunaan sejalan dengan konsep *perceived ease of use* dalam *Technology Acceptance Model*, yang menyatakan bahwa tingkat kemudahan penggunaan suatu sistem akan memengaruhi penerimaan dan intensitas penggunaan oleh pengguna (Majid & Budiman, 2022). Dalam konteks ini, sistem yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna terbukti mampu meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan aparatur dalam mengoperasikan aplikasi secara mandiri.



Gambar 4. Hasil evaluasi sistem monitoring perangkat daerah Kota Parepare

Terlihat pada Gambar 3, respons sistem juga dinilai cukup baik dengan mendapatkan skor 4,29. Hal ini menunjukkan performa aplikasi telah memenuhi ekspektasi, meskipun masih terdapat ruang untuk optimalisasi teknis. Kepuasan kinerja sistem dan fitur yang membantu pekerjaan sama-sama memperoleh skor 4,07, mengindikasikan manfaat langsung bagi pegawai dalam menunjang tugas harian. Sementara itu, kesesuaian sistem dengan kebutuhan meraih skor 4,00, memperlihatkan bahwa meski sistem sudah relevan dengan kebutuhan pengguna, tetap diperlukan penyesuaian berkelanjutan agar semakin sesuai dengan dinamika kerja di Bappeda.

Hasil ini juga selaras dengan model evaluasi pelatihan yang dikemukakan oleh Donald Kirkpatrick, khususnya pada level *reaction* dan *learning*, di mana tingkat kepuasan pengguna yang tinggi mencerminkan penerimaan positif terhadap sistem, serta menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengguna (Afkar & Hidayati, 2025).

Secara umum, hasil pelaksanaan PkM dalam pengembangan Sistem Monitoring Pembangunan di Kota Parepare menunjukkan konsistensi dengan praktik-praktik monitoring digital yang telah dilakukan di daerah lain, seperti Surabaya dengan sistem e-Monev sebagaimana dibahas dalam penelitian oleh Seyselis & Pradana (2021). Penelitian tersebut menyatakan bahwa penggunaan e-Monev di Surabaya telah efektif dalam memperbaiki



akurasi data, mempercepat proses pelaporan, serta meningkatkan persentase penyerapan anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan program pada level makro. Namun, berbeda dengan pendekatan tersebut, sistem yang dikembangkan di Parepare lebih menekankan pada aspek operasional, khususnya peningkatan validitas dan konsistensi data melalui mekanisme penguncian data triwulan serta kemudahan penggunaan sistem oleh aparatur, sehingga lebih adaptif terhadap kebutuhan dan kondisi kerja di tingkat daerah.

Hasil pre-test dan post-test pada kegiatan ini memperlihatkan peningkatan yang signifikan terutama pada aspek teknis sistem, sama seperti yang ditemukan kota jember juga memperlihatkan adanya peningkatan pada sistem pelayanan publik setelah melaksanakan digitalisasi (Tri Utami, 2025). Sementara itu, skor kuesioner evaluasi yang menunjukkan kepuasan tinggi terhadap kemudahan penggunaan, dukungan teknis, dan validitas data memperkuat bahwa penerapan sistem tidak hanya ideal secara desain tetapi juga berhasil diterima dalam praktik lapangan.

Sebagai tambahan, praktik Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SMEP) di Jawa Timur pada link smep.jatimprov.go.id, yang juga mengadopsi teknologi digital untuk pengawasan realisasi dan capaian indikator Pembangunan (Galih, 2024), menunjukkan bahwa sistem digital mampu menyediakan dashboard capaian secara berkala dan real-time sehingga mempermudah koordinasi antar perangkat daerah. Hal ini selaras dengan dampak terhadap Parepare, di mana dashboard interaktif dan mekanisme penguncian data triwulan meningkatkan transparansi dan memungkinkan pihak terkait segera mendeteksi deviasi atau keterlambatan.

Kegiatan PkM kolaborasi akademik antara pemerintah dan universitas ini tidak hanya memenuhi kebutuhan mitra dalam konteks Parepare, tetapi juga menunjukkan bahwa solusi digital monitoring pembangunan yang dilaksanakan sejalan dengan tren nasional pemerintahan yang semakin mengutamakan *data-driven governance*. Penggunaan teknologi, pelatihan teknis, serta evaluasi melalui pre-post test dan survei pengguna di Parepare menjadi bukti bahwa transformasi digital pelayanan publik berjalan efektif bila disertai pendampingan dan adaptasi kebutuhan lokal.

Kesimpulan

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini telah memberikan solusi nyata atas permasalahan mitra yang selama ini masih menggunakan sistem manual berbasis dokumen fisik dan Excel. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa sistem mampu meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, serta akuntabilitas pelaporan pembangunan. Peningkatan kapasitas SDM terlihat melalui pelatihan dan pendampingan teknis, di mana hasil pre-test dan post-test menunjukkan adanya perbaikan signifikan, khususnya pada aspek teknis dengan kenaikan akurasi sebesar 25% (dari 64% menjadi 89%).

Selain itu, tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem juga tergolong tinggi, dengan skor tertinggi pada aspek kemudahan penggunaan mencapai 4,50 dari skala 5, yang menunjukkan bahwa sistem mudah dioperasikan dan diterima dengan baik oleh pengguna. Keberlanjutan program, disarankan agar pelatihan lanjutan dilakukan secara berkala sehingga pegawai dapat lebih mendalami fitur-fitur sistem monitoring pembangunan, termasuk modul tambahan yang akan dikembangkan di masa mendatang seperti Sistem Pengukuran Indikator Kinerja. Selain itu, kolaborasi antara akademisi dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat dalam bentuk penelitian dan pengabdian lanjutan guna memastikan sistem ini tetap adaptif terhadap kebutuhan pembangunan daerah



Saran

Keberhasilan implementasi sistem monitoring di Kota Parepare didorong oleh beberapa faktor utama, yaitu dukungan kelembagaan melalui kerja sama resmi antara LPPM-PM ITH dan Bappeda, kesiapan SDM baik dari tim pengembang maupun pengguna, serta dukungan pendanaan melalui hibah kolaborasi pengabdian masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan, seperti kebiasaan kerja manual yang memerlukan waktu adaptasi, kebutuhan peningkatan pemahaman teknis terhadap fitur sistem, serta perlunya integrasi dengan sistem lain di lingkungan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil tersebut, terdapat beberapa rekomendasi tindak lanjut bagi Pemerintah Kota Parepare dan perangkat daerah. Pertama, perlu dilakukan pelatihan lanjutan secara berkala untuk meningkatkan literasi digital dan pemanfaatan fitur sistem secara optimal, khususnya terkait validasi data dan mekanisme penguncian data triwulan. Kedua, diperlukan penguatan kebijakan internal yang mewajibkan penggunaan sistem e-Monev sebagai satu-satunya platform pelaporan pembangunan guna memastikan konsistensi dan integritas data. Ketiga, perlu dilakukan pengembangan dan integrasi sistem dengan aplikasi lain, seperti Sistem Inovasi Daerah dan Sistem Pengukuran Indikator Kinerja, agar tercipta ekosistem data yang terintegrasi.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bappeda Kota Parepare atas dukungan, partisipasi, dan keterbukaan dalam pelaksanaan program ini. Apresiasi juga diberikan kepada LPPM-PM ITH yang telah memfasilitasi hibah pengabdian dengan nomor perjanjian 016/IT13.D/KH-LPPMPM/PPM-PK/2025 serta mendukung penuh keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan ini.

Daftar Pustaka

- Afkar, M., & Hidayati, R. A. (2025). Analisis Dampak Program Pelatihan Secara E-Learning Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Bea dan Cukai Gresik. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 13(1), 107–118. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v13i1.613>
- El Falah, H. N., Widianingsih, I., & Afrilia, U. A. (2025). Tata Kelola Aset Fisik Akuntabel Melalui Implementasi Inventarisasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. *Responsive*, 8(3), 441–451. <https://doi.org/10.24198/responsive.v8i3.64180>
- Galih. (2024, September 15). *Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penggunaan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SMEP) sebagai Langkah Mewujudkan Digitalisasi Pemprov Jawa Timur Menuju Indonesia Digital Tahun 2045. 2024 September 15 [dikutip 2025 Maret 13]*.
- Judijanto, L. (2025). Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia: Tantangan Hukum dan Administrasi Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 3(2), 16–23.
- Katharina, R., & Savira, E. M. (2022). Kebijakan satu data Indonesia: Tantangan dan rekomendasi. In *Kebijakan satu data Indonesia* (pp. 1–18). Publica Indonesia.
- Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2015). *The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development* (Eighth edition, pp. 18–20). Routledge.
- Majid, M. N., & Budiman, K. (2022). Acceptance Analysis of Technology-based Personnel Management Information Systems (Simpatik) In Supporting The Implementation of eGovernment In The Semarang City Manpower Service. *Journal of Advances in*



- Information Systems and Technology*, 3(2), 21–31.
<https://doi.org/10.15294/jaist.v3i2.53708>
- Mozin, S. Y., Abdullah, S., & Sawali, N. (2025). *Pemanfaatan Teknologi Cerdas untuk Pelayanan Publik: Study Tentang E-Government dan Smart City Berbasis ICT Big Data dan AI*. 02(02).
- Mustacisa-Lacaba, M. M. (2026). *Assessing farmers' readiness for science and technology education: A baseline study in Andragogy*. 16(7).
<https://doi.org/10.46223/HCMCOUJS.soci.en.16.4.3987.2026>
- Nasir, M. (2023). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023. *Journal of Geopolitics and Public Policy*, 1(2).
- Salam, R., Aris Bahasruddin, Indra Dharma Wijaya, & Muhammad Faisal. (2024). Strategi Meningkatkan Resiliensi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Pada Era Digital. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(2), 309–326. <https://doi.org/10.52316/jap.v20i2.437>
- Seyselis, M., & Pradana, G. W. (2021). Efektivitas Sistem Electronic Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. *Publika*, 37–48. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p37-48>
- Tri Utami, A. (2025). Optimalisasi Tata Kelola Melalui Digitalisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Mewujudkan Efisiensi dan Transparansi di Jember. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(3), 10. <https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4214>
- Ulhaq, D. A. D., & Winarti, H. T. (2026). The Effectiveness of The Sewing Training Program at The Vocational and Productivity Training Agency of Samarinda City In Improving Community Economic Skills and Independence. *EMPOWERMENT: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah*, 15(1).
<https://doi.org/10.22460/empowerment.v15i1.6985>
- Yuli Santri Isma, Depita Kardiati, Muslem Muslem, Sarrah Kurnia Fadhillah, Jamiati Kn, Fitria Akmal, & Syarifah Chairunnisak. (2025). Transformasi Digital Sebagai Instrumen untuk Memperluas Aksesibilitas Layanan Publik. *Journal of Administrative and Social Science*, 6(2), 66–77. <https://doi.org/10.55606/jass.v6i2.1891>